

## ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI HABITUASI DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN KARAKTER SISWA** (Studi Deskriptif di SMP Negeri 1 Cianjur-Jawa Barat). Tesis. **Apiek Gandamana, S.Pd, 2013.**

Penelitian ini dilatarbelakangi keprihatinan terhadap maraknya perbuatan korupsi pada masyarakat, meningkatnya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, serta sebagai upaya untuk pencegahan perbuatan korupsi pada generasi muda dalam bentuk implementasi pendidikan antikorupsi. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam implementasi pendidikan antikorupsi. Secara khusus penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bentuk implementasi pendidikan anti korupsi melalui habituasi dan pembelajaran PKn, faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi pendidikan antikorupsi melalui habituasi dan pembelajaran PKn, serta upaya mengatasi hambatan-hambatan implementasi pendidikan antikorupsi melalui habituasi dan pembelajaran PKn. Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 1 Cianjur. Adapun yang menjadi subjek penelitiannya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru PKn, dan peserta didik kelas VII dan VIII. Proses penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *deskriptif* dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi literatur, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, pengolahan data dan analisis melalui proses menyusun, mengkategorikan data, mencari kaitan isi dari berbagai data yang diperoleh dengan maksud untuk mendapatkan maknanya. Penelitian ini dilandasi oleh teori perkembangan moral (Lickona), teori korupsi (Robert Klitgaard), dan kajian *civic education* (Cogan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) model implementasi pendidikan antikorupsi dilakukan dengan 2 cara yakni, mengintegrasikan materi pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran PKn dan model pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas sekolah. (2) Faktor pendukung adalah adanya komitmen yang baik dari seluruh warga sekolah dan orangtua, serta adanya dukungan dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yaitu kesulitan guru dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran PKn serta faktor lingkungan yang melihat korupsi sebagai hal yang biasa atau membudaya. (3) Sekolah harus lebih memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti seminar maupun pelatihan tentang pembelajaran antikorupsi, guru lebih sering mempelajari pendidikan antikorupsi agar mendapatkan kemudahan dalam pengintegrasian pendidikan antikorupsi. Dan adanya komitmen yang kuat dari seluruh warga sekolah dan juga pemerintah dalam rangka mendukung implementasi pendidikan antikorupsi tersebut. Kesimpulan penelitian ini pendidikan antikorupsi akan lebih efektif apabila diintegrasikan dengan mata pelajaran PKn dan dilakukan melalui pembiasaan berupa kantin kejujuran sebagai upaya siswa membiasakan berbuat jujur. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah harus mensosialisasikan pendidikan antikorupsi, sekolah harus konsisten melaksanakan program pendidikan antikorupsi, dan Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan mengambil sampel yang lebih besar dan metode penelitian yang berbeda.

## ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION THROUGH HABITUATION AND LEARNING CIVICS TO BUILD STUDENT'S CHARACTER (Descriptive Study in SMP Negeri 1 Cianjur, West Java).**Thesis. Apiek Gandamana, S.Pd, 2013.**

The research concerns about the proliferation of corruption act in the society, the increasing of corruption act committed by officials state, as well as the government's program for anti-corruption education in an effort to prevent acts of corruption in the younger generation. This study generally aims to describe and analyzing in depth the implementation of anti-corruption education and learning through habituation Civics. Specifically this study aims to describe and analyze in -depth study of the implementation of anti-corruption through habituation and learning Civics, the factors inhibiting and supporting the implementation of anti-corruption education and learning through habituation Civics, as well as efforts to overcome barriers to the implementation of anti-corruption education and learning through habituation Civics.

This study is located in SMP Negeri 1 Cianjur. The subject of his research is the principal, vice principal, Civics teachers, and students of class VII and VIII. Research process using a qualitative approach with descriptive methods of data collection techniques such as observation, interviews, literature study, and study documentation. In this research, data processing and analysis through the process of preparing, categorizing the data, look for the link contents of various data obtained in order to get the meaning. Grand Theory of theory moral action (Lickona), theory corruption (Robert Klitgaard), and theory the study civic education (Cogan). Results showed that (1) the implementation of anti-corruption education is done by integrating anti-corruption education material into Civics subject because when used as a separate subject would burden the students itself, the habituation performed by all people in schools environment that instill the values of honesty, and discipline, as well as a canteen of honesty as a form of students habituation to do what is right; (2) supporting factor is a good commitment from the whole school community and parents, as well as the support of the government. While inhibiting factor is difficulty in integrating anti-corruption education teacher in Civics subjects and environmental factors that saw corruption as usual or entrenched. The Conclusion of this study that anti-corruption education is more effective when its integrated with Civics subject and carried out through habituation, and the canteen of honesty appeared as an effort to familiarize students to do honest. Recomendation the solution schools should be provided the opportunity for teachers to attend workshop and training on anti-corruption learning, the teacher is more often study the anti-corruption education in order to get the ease of integration of anti-

corruption education. And the presence of strong commitment of all schools environment as well as government in order to support the implementation of anti-corruption education.